

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Dalam konteks penyelenggaraan pemerintahan yang baik (*Good Governance*) dapat diartikan sebagai suatu sistem yang berfungsi untuk mengarahkan dan mengendalikan suatu organisasi dalam mencapai tujuannya. Pada awalnya *good governance* hanya muncul di organisasi-organisasi pemerintahan saja. Isu utama *good governance* secara umum adalah sikap masyarakat yang secara gencar menuntut pemerintah untuk melaksanakan tata kelola yang baik. Karena pola-pola lama yang dikelola pemerintah dinilai tidak sesuai lagi dengan tatanan masyarakat yang telah mengalami perubahan sehingga tata kelola yang baik (*good governance*) diperlukan. Pola-pola lama penyelenggaraan pemerintah dinilai tidak sesuai karena pemerintah menempatkan *state* (negara atau pemerintah) pada posisi yang dominan, dimana pemerintah tidak hanya berperan selaku regulator dan fasilitator tetapi sekaligus juga sebagai aktor (pelaku pasar), telah menjadikan masyarakat (rakyat) sebagai pihak yang amat diabaikan dalam setiap proses pembangunan (Narang, 2008)

Good governance adalah penentu utama kepercayaan publik pada pemerintah, melebihi pertimbangan ekonomi (Spiteri 2018) dan *Good governance* telah dijadikan sebagai tolok ukur bagi pihak pengelola apakah telah menjalankan tugas dan fungsinya secara efektif dan efisien dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Seiring berjalannya waktu, perkembangan konsep *good governance*

dipahami sebagai konsep yang lebih luas lagi, yaitu *Good University Governance* (GUG).

GUG merupakan turunan dari konsep *good governance* dan dijadikan dasar dalam menyusun konsep-konsep baru untuk institusi perguruan tinggi dengan mengadopsi prinsip-prinsip dasar dari *good governance*. (Muhi, 2011).

Wijatno (2009:370) berpendapat bahwa secara sederhana GUG dapat dipandang sebagai penerapan prinsip-prinsip dasar *good governance* dalam sistem dan proses pengelolaan institusi perguruan tinggi melalui berbagai penyesuaian yang dilakukan berdasarkan nilai-nilai yang harus dijunjung tinggi dalam penyelenggaraan perguruan tinggi secara khusus dan pendidikan secara umum. Kewajiban penataan diri dengan menerapkan aspek *good governance* akan menjadi salah satu tolok ukur utama bagi kualitas perguruan tinggi.

Konsepsi Pendidikan Tinggi di Indonesia berdasarkan Peraturan Pemerintah nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi, memberikan otonomi kepada perguruan tinggi sebagai pusat penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi. Perguruan tinggi negeri (PTN) dan perguruan tinggi swasta (PTS) mempunyai otonomi untuk mengelola sendiri lembaganya. Otonomi dimaksud: 1) Otonomi di bidang akademik, meliputi penetapan norma dan kebijakan operasional serta pelaksanaan pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat; dan 2) Otonomi di bidang non akademik, meliputi penetapan norma dan kebijakan operasional serta pelaksanaan organisasi, keuangan, kemahasiswaan, ketenagakerjaan, dan sarana

prasarana. Pengelolaan Otonomi non-akademik untuk meningkatkan mutu pendidikan dilaksanakan melalui prinsip *good university governance (GUG)*.

Prinsip-prinsip tata kelola meliputi transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi, dan keadilan sudah merupakan suatu keharusan untuk ditegakkan di perguruan tinggi terlebih kalau dilihat realitas yang dihadapi pendidikan tinggi di Indonesia. Seperti yang dilansir Kemendikbud, bahwa mutu pendidikan tinggi di Indonesia masih rendah. Hal ini dapat dilihat dari rendahnya jumlah pendidikan tinggi di Indonesia yang terakreditasi “A”. Data menunjukkan, per 31 Desember 2014 belum ada perguruan tinggi di Sumatera Utara yang mendapatkan perangsangan “A” untuk akreditasi institusi. (<http://ban-pt.kemdikbud.go.id/diraippt.php>,2016)

Terkait hal di atas, masalah akreditasi merupakan salah satu tantangan bagi perguruan tinggi yang berada di Sumatera Utara, salah satu diantaranya adalah Universitas Negeri Medan (UNIMED). UNIMED mendapat nilai akreditasi yang diberikan oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) pada tahun 2014, masih berada pada level “B” dengan skor 352. Perbaikan skor melalui peningkatan kinerja oleh Manajemen UNIMED telah menunjukkan hasil yang ditandai dengan tercapainya skor akreditasi “A”, dimana skor yang dicapai lebih besar dari 360 pada tanggal 28 Desember 2016. (Humas UNIMED, 2016)

Tantangan lain ialah masalah yang telah menjadi perbincangan adalah kenaikan uang kuliah di UNIMED (news.analisadaily.com,2016) yang akan menyebabkan adanya tuntutan transparansi dan akuntabilitas dari *stakeholder* mendorong pihak manajemen untuk menghasilkan laporan berkualitas yang

terbebas dari unsur *fraud*. Semakin tingginya biaya pendidikan di tingkat Perguruan tinggi menyebabkan biaya yang dikelola Perguruan Tinggi menjadi tidak sedikit. Pengawasan yang lebih ketat perlu dilakukan dalam upaya mencegah terjadinya perilaku penyimpangan melalui peningkatan sistem pengendalian internal (*Internal Control System*) (Dewi dan Apandi. 2012).

Berdasarkan hal di atas maka dibutuhkan peranan Satuan Pengawasan Internal (SPI) yang bertujuan untuk membantu pimpinan satuan kerja perguruan tinggi dalam melaksanakan kegiatan serta tugas dan fungsi pimpinan dengan tujuan untuk menyelenggarakan pelaksanaan pengawasan di lingkungan kerja perguruan tinggi agar memberikan keyakinan bahwa tugas dan fungsi serta kebijakan yang dikeluarkan oleh Manajemen perguruan tinggi dapat berjalan sebagaimana semestinya. Hal ini juga berkaitan bahwa Satuan Pengawasan Internal (SPI) merupakan salah satu faktor yang berkontribusi dalam mewujudkan tata kelola perguruan tinggi yang baik atau *Good University Governance (GUG)*.

Dalam upaya mewujudkan *GUG*, setiap institusi pendidikan memerlukan peran Satuan Pengawasan Internal (SPI) hal ini sesuai berdasar Peraturan Menteri Pendidikan Nasional (Permendiknas) No 47 tahun 2011 bahwa Satuan Pengawasan Intern adalah satuan pengawasan yang dibentuk untuk membantu terselenggaranya pengawasan terhadap pelaksanaan tugas unit kerja di lingkungan Kementerian Pendidikan Nasional. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 Permendiknas di atas, SPI menyelenggarakan fungsi: penyusunan program pengawasan, pengawasan kebijakan dan program, pengawasan pengelolaan kepegawaian, keuangan, dan barang milik Negara,

pemantauan dan pengkoordinasian tindak lanjut hasil pemeriksaan internal dan eksternal, pendampingan dan revidi laporan keuangan, pemberian saran dan rekomendasi; penyusunan laporan hasil pengawasan; dan pelaksanaan evaluasi hasil pengawasan. Satuan Pengawasan Internal (SPI) merupakan salah satu satuan kerja yang menunjang terwujudnya *GUG* yang pada saat ini telah berkembang menjadi komponen utama dalam meningkatkan universitas secara efektif dan efisien. Perguruan tinggi mampu memberikan kontribusi positif melalui pengimplementasian lima prinsip *GUG* yang dibantu oleh satuan kerja, salah satunya adalah Satuan Pengawasan Intern (SPI) yang dimiliki oleh perguruan tinggi. Hal ini juga sejalan dengan Universitas Negeri Medan sebagai lembaga PTN mempunyai prioritas kerja yang tertuang dalam visi/misi untuk mewujudkan *Good University Governance*. (Buku Pedoman SPI-UNIMED)

Selain Satuan Pengawasan Internal, sistem pengendalian internal atau *Internal Control* merupakan unsur yang juga sangat penting dalam penerapan *good governance*. Sistem pengendalian yang efektif dapat menjamin operasi perusahaan yang efektif dan efisien serta dipatuhinya aturan-aturan internal perusahaan dan aturan dari luar yang terkait dengan perusahaan sehingga dapat terciptanya akuntabilitas (Gusnardi. 2008 dalam Untari 2015).

Oleh karena itu, *Internal Control* secara relatif dapat membantu pencapaian target baik peningkatan kinerja perusahaan dan target keuntungan serta kepatuhan terhadap undang-undang dan peraturan pelaksanaannya, maupun terhindar dari kerusakan dan konsekuensi buruk lainnya. (Tim Studi

Penerapan Pengendalian Intern Pada Emiten dan Perusahaan Publik, 2006:20 dalam Untari 2015)

Menurut Panggabean (2011), *Internal Control* merupakan sebuah sistem sedangkan satuan pengawasan internal adalah organ atau unit yang menjalankannya. Peran Satuan Pengawasan Intern (SPI) dan *Internal Control* yang baik diharapkan membantu pimpinan unit kerja dalam mencapai tujuan yaitu terwujudnya *Good University Governance (GUG)*.

Selain *Internal Control*, masih ada faktor lain yang juga berpengaruh dalam mencapai *good university governance* yaitu budaya organisasi. Budaya organisasi juga ikut berperan karena berpengaruh terhadap kinerja suatu organisasi sehingga dapat mempengaruhi tercapainya tujuan organisasi. Menurut Moeljono (2003) dalam Gunawan (2008:442) kinerja dipengaruhi oleh budaya organisasi. Sehingga apabila semakin baik kinerja suatu organisasi maka semakin terwujudnya GUG. Budaya organisasi merupakan penyebaran sistem kepercayaan dan nilai-nilai yang berkembang dalam suatu organisasi dan mengarahkan perilaku anggota-anggotanya.

Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Untari (2015). Adapun perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya ialah terletak pada: variabel independen dan ruang lingkup penelitian.

Pada penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Untari (2015) variabel yang digunakan adalah Satuan Pengawasan Intern (SPI) dan *Internal Control* sebagai variabel independen dan *Good University Governance (GUG)* sebagai variabel dependen, sedangkan pada penelitian ini penulis menambahkan satu variabel

independen yaitu Budaya Organisasi dikarenakan variabel ini mempengaruhi cara kerja dan perilaku para anggota organisasi. Ruang lingkup penelitian sebelumnya adalah perguruan tinggi di wilayah DKI Jakarta dan Bogor yang berstatus Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum PPK-BLU maupun perguruan tinggi yang tidak berstatus PPK-BLU namun sudah memiliki Satuan Pengawasan Intern (SPI). Sedangkan ruang lingkup dalam penelitian ini adalah Universitas yang ada di Sumatera Utara khususnya ibu kota Medan yang memiliki unit Satuan Pengawasan Internal (SPI) atau SPMI.

Berdasarkan uraian diatas, peneliti tertarik melakukan penelitian untuk mengetahui bukti empiris tentang persepsi aparaturnya SPI tentang peranan Satuan Pengawasan Intern (SPI), penerapan *Internal Control*, dan kondisi Budaya Organisasi terhadap pencapaian *Good University Governance (GUG)*. Berdasarkan hal tersebut, maka peneliti melakukan penelitian yang berjudul **“Pengaruh Satuan Pengawasan Intern (SPI), *Internal Control*, dan Budaya Organisasi Terhadap *Good University Governance (GUG)*”**.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka identifikasi masalah dalam penelitian ini meliputi :

1. Apakah peranan Satuan Pengawasan Internal (SPI) dapat meningkatkan pencapaian *Good University Governance*?
2. Apakah penerapan *Internal Control* berpengaruh terhadap *Good University Governance*?

3. Apakah Budaya Organisasi dapat mempengaruhi tercapainya *Good University Governance*?

1.3 Pembatasan Masalah

Untuk menghindari kesimpangsiuran dan penafsiran yang berbeda-beda serta mengingat luasnya cakupan penelitian, peneliti membatasi masalah hanya untuk melihat pengaruh Satuan Pengawasan Internal (SPI), *Internal Control*, dan Budaya Organisasi Terhadap *Good University Governance*.

1.4 Rumusan Masalah

Berdasarkan pembatasan masalah, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Apakah Satuan Pengawasan Internal (SPI) berpengaruh terhadap *Good University Governance*?
2. Apakah *Internal Control* berpengaruh terhadap *Good University Governance*?
3. Apakah Budaya Organisasi berpengaruh terhadap *Good University Governance*?
4. Apakah Satuan Pengawasan Internal (SPI), *Internal Control*, dan Budaya Organisasi secara simultan berpengaruh terhadap *Good University Governance*?

1.5 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Mengetahui pengaruh Satuan Pengawasan Internal (SPI) terhadap Good University Governance (GUG).
2. Mengetahui pengaruh *Internal Control* terhadap Good University Governance (GUG).
3. Mengetahui pengaruh Budaya Organisasi terhadap Good University Governance (GUG).
4. Mengetahui pengaruh Satuan Pengawasan Internal (SPI), *Internal Control*, dan Budaya Organisasi terhadap Good University Governance (GUG).

1.6 Manfaat Penelitian

1. Mahasiswa Jurusan Akuntansi, penelitian ini bermanfaat sebagai bahan referensi penelitian selanjutnya dan pembanding untuk menambah ilmu pengetahuan.
2. Masyarakat, sebagai sarana informasi tentang *Good University Governance (GUG)* serta menambah pengetahuan akuntansi khususnya *auditing* dan akuntansi keperilakuan dengan memberikan bukti empiris tentang pengaruh Satuan Pengawasan Intern (SPI), *Internal Control* dan Budaya Organisasi terhadap pencapaian *Good University Governance (GUG)*.
3. Peneliti, sebagai penambah pengetahuan serta referensi mengenai *auditing*, terutama mengenai *Good University Governance (GUG)* sehingga diharapkan dapat bermanfaat bagi penulis di masa yang akan datang.

4. Bagi Perguruan Tinggi, agar melakukan evaluasi dan perbaikan terhadap peran Satuan Pengawasan Internal (SPI), penerapan *Internal Control* dan mengkaji kondisi Budaya organisasi di institusi masing-masing
5. Auditor internal, agar melakukan evaluasi dan perbaikan dalam menjalankan perannya untuk mewujudkan *Good University Governance* (GUG).



THE
Character Building
UNIVERSITY